

Tantangan dan Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Nursalam^{1*}, Melkisedek N.B.C. Neolaka^{2*}

¹Dosen pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Undana

²Dosen Pada Prodi Ilmu Administrasi Negara Fisip Undana

*nursalamjeppu@yahoo.com , neolakamelkisedek16@gmail.com

Kondisi Pariwisata d Provinsi Nusa Tenggara Timur

- Pertumbuhan sektor pariwisata pada tahun 2017, yaitu 56,13%.
- Kontribusi sektor ini terhadap struktur ekonomi NTT masih kecil, yaitu hanya 0,74% (BPS NTT, 2018).
- Dewasa ini provinsi NTT memiliki 443 Daerah Tujuan Wisata (DTW), yang cukup terkenal dapat disebutkan yaitu; (1) Labuang Bajo; (2) Resort Nihiwatu; (3) Pulau Sumba; (4) Taman Nasional Matalawa; (5) Pulau Flores dengan Komodo dan Taman Nasional Kelimutu.

kunjungan wisatawan ke provinsi NTT mengalami kemunduran sangat jauh akibat pandemik Covid 19. Data yang tercatat pada Tahun 2019 sebanyak 1,4 juta lebih orang, naik 14% dibandingkan Tahun 2018. Kondisi kunjungan pada Tahun 2020, sampai dengan Juli 2020, wisatawan yang berkunjung ke NTT sekitar 130.000-an atau mengalami penurunan yang drastis. Terlepas dari masalah pandemik Covid 19

Kunjungan wisatawan di NTT

Tahun	Pengunjung LN	Pengunjung DN	Perkiraan Uang Yang Dikeluarkan	
			USD	Rupiah
2014	65,939	331,604	32,725,525.7	460.120.891.3
2015	66,860	374,456	33,182,618	466.547.609.0
2016	113,860	776,744	56,126,070	789.132.544.2
2017	124,398	932,093	61,738,727.4	868.046.507.2

Meningkatkan pembangunan pariwisata dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat.

Tujuan pengembangan pariwisata NTT;

- ❖ Peningkatan kontribusi ekonomi kepariwisataan NTT;
- ❖ Peningkatan daya saing kepariwisataan NTT;
- ❖ Peningkatan kontribusi ekonomi dari industri kreatif;
- ❖ Peningkatan apresiasi terhadap pelaku dan karya kreatif;
- ❖ Peningkatan kapasitas dan profesionalisme SDM pariwisata dan ekonomi kreatif;
- ❖ Penciptaan inovasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif;
- ❖ Peningkatan Kualitas Destinasi Pariwisata, dan;
- ❖ Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) aparatur dan Pelaku.

- ✓ Pemerintah daerah menghadapi situasi strategis dalam upaya pengembangan pariwisata, yaitu tingkat persaingan yang semakin ketat untuk merebut pangsa pasar pariwisata dunia, Masalah tingkat kemiskinan masih tinggi, sebanyak 21,21% atau sekitar 1.173,530 ribu orang
- ✓ Isu strategis pengembangan kepariwisataan di NTT terdiri dari; (1) investasi dalam industri pariwisata; (2) daya saing destinasi pariwisata; (3) sumber daya manusia; (4) kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Dinas pariwisata prov. NTT, 2018)

Berdasarkan gambaran kondisi potensi dan permasalahan pengembangan kepariwisataan yang telah diuraikan maka selanjutnya menimbulkan pertanyaan lanjutan yaitu mungkinkah pengembangan sektor pariwisata provinsi NTT dapat berkelanjutan dan apakah tantangan yang dihadapi untuk mencapai keberlanjutan tersebut.

Konsep Pariwisata Berkelanjutan

Pembangunan pariwisata yang berhasil bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi negara melalui kontribusi terhadap PDB (*product domestic bruto*) nasional. Aktivitas di sektor pariwisata selain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan bagi penduduk lokal, namun juga pengembangan pariwisata dapat memberikan dampak yang negatif terhadap pembangunan (Neto, 2003; Streimikiene et al, 2020)

Menurut Byrkjeland (1995), hal penting yang perlu diperhatikan dalam pariwisata berkelanjutan adalah dampak yang dihasilkan dari keseluruhan jumlah kegiatan terkait pariwisata. Dampak yang dimaksud adalah dampak pada aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek ekologi

Kebijakan Pariwisata Berkelanjutan

Pemerintah memiliki peran penting dalam pengembangan dan pengelolaan pariwisata dan membuatnya lebih berkelanjutan. Menurut WTO dan UNEP (2005) di negara berkembang, kepentingan pariwisata berkelanjutan lebih dikaitkan dengan pengentasan kemiskinan dan pendanaan konservasi, sedangkan di negara maju, masalah peremajaan dan manajemen pengunjung lebih menonjol

World Tourism Organization (2003) mengemukakan, pariwisata berkelanjutan merupakan konsep pembangunan/pengembangan pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini maupun masa depan.

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.

1. pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan; (2) pemanfaatan ekonomi untuk masyarakat lokal; (3) pelestarian budaya bagi masyarakat dan pengunjung; (4) pelestarian lingkungan.

Tantangan Pariwisata Berkelanjutan di NTT

Jenis Tantangan	Kategori		
1. Pengurangan angka kemiskinan 2. Partisipasi masyarakat 3. Kolaborasi sektor publik-swasta 4. Investasi pariwisata 5. Sarana dan prasana pendukung pariwisata 6. Keterbatasan SDM pariwisata	Tinggi	Sedang	Rendah
	Tinggi		
	Tinggi	Sedang	

Strategi yang ditempuh oleh pemerintah daerah dalam upaya pengembangan pariwisata menggunakan pendekatan kewilayahan. Strategi ini berkaitan dengan faktor pembiayaan investasi pariwisata yang cukup mahal dan azas sistem pemerintahan daerah yaitu desentralisasi.

Menurut Yfantidou¹ dan Matarazzo (2016), pemerintah memiliki peran penting dalam menyediakan infrastruktur, kepemimpinan, regulasi, dan dukungan keuangan yang memadai. Fasilitas ini akan menjadi landasan bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan dalam jangka panjang.

Strategi pariwisata nasional berkaitan dengan:

1. Visi pariwisata nasional;
2. Posisi dan arah keseluruhan pariwisata;
3. Masalah keseluruhan kecocokan pasar produk;
4. Isu-isu spasial yang luas dalam pengembangan pariwisata;
5. Masalah fiskal;
6. Menetapkan standar untuk industri;
7. Pengendalian undang-undang, peraturan dan mekanisme lainnya;
8. Mendukung program termasuk sumber daya keuangan;
9. Penelitian, dan perolehan dan penyebaran pengetahuan;
10. Strategi pemasaran dan promosi, terutama di tingkat internasional.

Strategi pariwisata lokal berkaitan dengan:

1. Visi holistik untuk destinasi lokal;
2. Tujuan dan prioritas lokal;
3. peluang dan kendala sumber daya lokal;
4. volume dan sifat pariwisata yang dicari;
5. Identitas dan branding destinasi;
6. Produk pembangunan termasuk lokasi dan hubungannya dengan rencana tata guna lahan;
7. Jaringan lokal dan rantai pasokan;
8. Penyediaan infrastruktur;
9. Tempat dan atraksi wisata tertentu;
10. Manajemen pengunjung;
11. Informasi pengunjung dan pemasaran destinasi.

Strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan provinsi NTT

1. Harmonisasi kebijakan kepariwisataan, yaitu mengharmonisasikan kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
2. Pengembangan wisata minat khusus, sangat mengharapkan dukungan kebijakan dekonsentrasi untuk pembiayaannya;
3. Pengembangan dan pemberdayaan SDM pariwisata, lebih memberi peran pemerintah dalam segi manajemennya;
4. Pengembangan industri pariwisata;
5. Pencitraan dan promosi pariwisata.